



|             |  |              |  |
|-------------|--|--------------|--|
| Media Title | Kontan                                 |              |  |
| Head Line   | Bappenas : Jalan Tol & Broadband Gagal |              |  |
| Date        | 2 Juli 2014                            | Color        |  |
| Section     | News                                   | Circulation  |  |
| Page No     | 20                                     | Article Size |  |
| Journalist  | Hrb                                    | Advalue      |  |
| Frequency   | Daily                                  | PR Value     |  |

## ■ INFRASTRUKTUR

# Bappenas: Jalan Tol & Broadband Gagal

JAKARTA. Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang akan berakhir ternyata menyisakan rapor merah dalam pembangunan infrastruktur vital seperti jalan tol dan penyediaan pita lebar atau *broadband* internet.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam kurun waktu 2010-2014, jumlah panjang jalan tol yang telah dibangun pemerintah dan swasta hanya mencapai 263,3 kilometer (km).

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S. Priatna mengatakan bahwa jika dihitung dari target, panjang jalan tol yang berhasil dibangun pada periode ini baru mencapai 26% dari total sepanjang 1.296 km yang direncanakan.

Salah satu biang kegagalan pemerintah dalam merealisasikan jalan tol ini dalam empat tahun terakhir adalah sulitnya pembebasan lahan," ujar Dedy kepada KONTAN, Selasa kemarin (1/7).

Dalam catatan KONTAN sepanjang 2014 ini ada beberapa ruas tol yang sudah rampung, antara lain jalan tol Semarang-Solo, ruas Ungaran-Bawen sepanjang 11,9 km dan jalan tol Bogor Ring Road

(HORR) seksi IIA sepanjang 2 km. Rencananya, jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 Utara Ciledug-Uluwatu sepanjang 2,07 km akan dibuka akhir bulan Juli ini.

Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Fathur Rohman menilai rendahnya prestasi ini disebabkan tidak adanya niat dan tekad untuk membangun jalan bebas hambatan ini.

Bukan hanya pembangunan jalan tol, Bappenas mencatat rapor merah lain adalah terkait kegagalan pemerintah menghubungkan ibukota kabupaten dengan jaringan *broadband*. Dalam kurun waktu 2010-2014, jumlah kabupaten kota yang sudah terhubung *broadband* baru mencapai 412 kabupaten.

Jika dihitung, pencapaian ini baru mencapai 86% dari target keseluruhan yang mencapai 437 kabupaten. "Maluku dan Papua menjadi wilayah yang belum terhubung sama sekali," kata Dedy.

Masalah utama yang menghambat sejumlah kabupaten sehingga belum bisa terhubung jaringan *broadband* adalah keterlambatan proses tender karena lambannya keputusan Kementerian Keuangan soal pemanfaatan dana *Universal Service Obligation* (USO) yang dibayarkan operator seluler setiap tahun.

Agus Triyono